

PELAKSANAAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF DETERMINATION*) DALAM KASUS REFERENDUM KOSOVO TAHUN 1991 DAN REFERENDUM CATALUNYA TAHUN 2017 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

OLEH:

FEBRY OLAN PUTRA

1510111021

Pembimbing I : Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., MH

Pembimbing II : Dr. Delfi Yanti, S.H., MH

Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right To Self Determination*)
dalam Kasus Referendum Kosovo Tahun 1991 dan Referendum Catalunya
2017 Ditinjau Dari Hukum Internasional**

*(Febryolan Putra, 1510111021, Fakultas Hukum Universitas Andalasa,
68 Halaman, 2019)*

ABSTRAK

Hak menentukan nasib sendiri (*Right to self Determination*) merupakan suatu hak yang dimiliki oleh bangsa atau dalam naskah aslinya disebut "People's" agar terbebas dari setiap tindakan penjajahan, konialisasi, pendudukan, penguasaan dan eksploitasi asing Pasal 55 Piagam PBB dan dalam Resolusi PBB Nomor 1514 (XV), hak inilah yang digunakan oleh Kosovo dan Catalunya untuk mencapai kemerdekaanya melalui referendum hal dilatarbelakangi oleh tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh negara induknya, walaupun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama, namun referendum tersebut menghasilkan sesuatu yang berbeda terhadap dua wilayah tersebut dengan hak tersebut Kosovo berhasil menjadi suatu negara yang berdaulat sedangkan Catalunya sampai saat ini masih menjadi wilayah integritas Spanyol, berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) dalam kasus referendum Kosovo 1991 dan referendum Catalunya 2017?, 2). Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) antara referendum Kosovo 1991 dan referendum Catalunya 2017?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Yuridis yaitu dengan mempelajari data-data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Ada perbedaan pelaksanaan antara hak menentukan nasib sendiri melalui referendum oleh Kosovo 1991 dan Catalunya 2017, Salah satunya adanya intervensi dari NATO dalam kasus pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri Kosovo 1991, 2). Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri oleh kedua wilayah tersebut adalah tidak mendapatkan izin dari negara induknya, tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan hak ini dan tidak mengetahui syarat dan dalam hal apa hak ini bisa dilaksanakan, namun hal ini bisa terjadi bukan murni karena ketidaktahuan wilayah tersebut akan tetapi memang karena sedikitnya aturan yang menyinggung hak ini ditambah lagi dengan sumirnya aturan tersebut.

Kata kunci : Hak menentukan nasib sendiri, referendum, Kosovo, Catalunya

**The Implementation of the Right to Self Determination on Kosovo
Referendum Case in 1991 and Catalunya Referendum Case in 2017 From the
Perspective of International Law**

(Febry Olan Putra, 1510111021, Faculty of Law, Andalas University, 76 Page, 2019)

ABSTRACT

The right to self determination is a right held by all nations, regulated in article paragraph (2) and article 55 of the UN charter. This right is also regulated in UN cgarter resolutions Number 1514 of 1960 and Number 2625 of 1970 as form liberation colonialism, guardianship and liberation from racist governmens. This right used by Kosovo and Catalunya for independence throught a referendum which is motivated by disrcimination in its main region. Despite the background same thing, but the referendum produces something dofferent, base on this, in this paper formulate the following problems: 1. How the implementation of the right to self determination on Kosovo referendum case in 1991 and Catalunya referendum case in 2017 from the perspective of international law ? 2. what are the obstacle in the implementation of the right to self determination on Kosovo referendum case in 1991 and Catalunya referendum case in 2017 from the perspective of international law ?, the research method used in this study is Noemative-Juridical by studying secondary data. The result of this study indicate that 1. There are differences in the the implementation of the right to self determination on Kosovo referendum case in 1991 and Catalunya referendum case in 2017 from the perspective of international law, based on reolution Number 1514 (XV) of 1960 and resolution Number 2625 of 1970 , only minority grpups in region with different ethnics were being colonialized by other nation or racist regime can used Right to self determination, such as Kosovo, while Catalunya did not meet these requirements 2. The obstacle in the implementation of the right to self determination on Kosovo referendum case in 1991 and Catalunya referendum case in 2017 from the perspective of international law did not get permission from the main country , based on principle territorial rules, article 2 paragraph (4) an resolution Number 1514 (VX) of 1960 and resolution Number 2625 Of 1970.

Keywords : Right to Self Determination; Referendum; Kosovo; Catalunya; International Law.